

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi bukanlah sebuah hal yang baru atau asing bagi bangsa Indonesia. Dalam catatan sejarah Indonesia, benih-benih korupsi bahkan sudah ada ketika bangsa Indonesia masih berada dalam situasi sebelum kemerdekaan atau ketika bangsa Indonesia masih di bawah penderitaan para penjajah. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa kisah sejarah yang menampakan dengan jelas adanya ladang subur korupsi di Indonesia untuk dijadikan lahan pertumbuhan benih-benih korupsi. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia zaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.¹ Bukti sejarah yang kuat ini tentunya memberikan dampak yang sangat panjang ditambah lagi dengan hasil-hasil korupsi dengan angka fantastis yang mampu membuat orang merasa sangat kaya, sombong, dan tidak memperhatikan solidaritas dengan sesamanya. Dengan kata lain, permasalahan korupsi ini bukanlah sebuah masalah yang baru muncul ke permukaan melainkan sudah ada sejak dulu sehingga korupsi dapat disebut sebagai kejahatan tertua bahkan dari masalah-masalah lain seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi pengadaan fasilitas atau layanan publik dan masih banyak masalah lain yang terjadi merupakan akibat dari korupsi sebagai akar permasalahannya.

Sejalan dengan itu, permasalahan ini sudah jelas berakar juga dengan pribadi seseorang dan lingkungan sekitarnya yang sangat menentukan sifat pribadinya. Korupsi dapat terjadi karena dua hal yang paling mendasar yaitu tidak adanya integritas pribadi tersebut dan edukasi dari keluarga inti yang sebenarnya menjadi sekolah pertama untuk menanamkan integritas diri seperti kejujuran, tanggung jawab dan nilai-nilai moral positif lainnya.² Kepribadian seseorang

¹ Halimang, St, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Bildung, 2020), hlm.9.

² Hasil wawancara dengan Servasius Sewar, Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka, pada 8 September 2025 di Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka.

mempunyai peran yang cukup besar dalam menentukan perbuatannya termasuk perbuatan korupsi, jika tidak dibentuk dengan bijak maka akan berisiko dalam bertindak. Selain kepribadian, faktor lingkungan juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi seseorang dalam bertindak dalam hal ini tindakan korupsi juga dipengaruhi oleh dua faktor tersebut.

Korupsi itu permasalahan yang sangat kompleks, tak hanya mendapat gelar sebagai masalah sosial, ekonomi maupun politik saja melainkan juga korupsi merupakan masalah moral terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kasus yang jahat seperti ini memberikan dampak yang sangat besar dan menggerogoti setiap sektor kehidupan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi korupsi merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan serta yang paling kejam adalah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat kecil. Ibarat sebuah pertunjukkan drama, pasti dibalik pertunjukkan tersebut ada dalang atau sutradara yang menjadi tokoh penting dalam pertunjukkan tersebut. Begitu pula dengan fenomena korupsi. Korupsi dapat disebut sebagai sebuah bentuk kejahatan struktural karena ada begitu banyak pihak yang menjadi pelaku atau dalang dari korupsi tersebut. Istilah dalang tersebut tentu saja mengarah pada pihak-pihak yang memiliki jabatan atau kewenangan, menggunakan kekuasaan untuk kekayaan dan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan bersama.

Di skala nasional, kasus-kasus korupsi sangat setia hadir menghiasi media-media nasional entah melalui siaran televisi, koran dan media lainnya. Kehadiran kasus-kasus korupsi tersebut semakin mempertegas kedudukan korupsi di Indonesia yaitu bukan lagi sebagai sebuah permasalahan kompleks, tetapi sudah cenderung menjadi budaya bangsa Indonesia. Laporan-laporan dari berbagai media tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi bukan hanya merajalela di pusat pemerintahan, tetapi juga menjalar hingga ke daerah-daerah. Oleh karena itu, korupsi sangat layak dan pantas disebut sebagai sebuah budaya yang sudah mengakar urat dan sulit diberantas jika raibnya kesadaran moral, politik dan religius yang mendalam.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 63 tersangka kasus korupsi di NTT sepanjang tahun 2024. Data ini sekaligus menempatkan NTT di posisi ketiga sebagai provinsi paling korup di Indonesia sepanjang tahun 2024.³ Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang juga tak luput dari kasus-kasus korupsi. Ada banyak kasus-kasus korupsi yang sudah terbukti dan sah. Khusus di Kabupaten Sikka, data dari pemberitaan lokal menunjukkan adanya beberapa pejabat publik terjerat kasus korupsi, misalnya terkait pengelolaan dana proyek pemerintah, pengadaan barang dan jasa, maupun dana-dana bantuan sosial. Sejalan dengan maraknya fenomena tersebut di NTT maka akan semakin memperburuk angka kemiskinan di NTT karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput, di mana program pembangunan yang seharusnya dirasakan manfaatnya menjadi terbengkalai atau tidak maksimal. Masyarakat menjadi sasaran kerugian dan korban dari fenomena ini. Situasi ini bukan hanya memperburuk angka kemiskinan, tetapi meningkatkan ketidakadilan sosial, serta memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Situasi buruk yang diciptakan karena adanya tindakan korupsi pada akhirnya membutuhkan uluran bantuan dari beberapa elemen masyarakat sipil, termasuk lembaga religius. Dalam posisi inilah, Gereja berperan sebagai salah-satu institusi keagamaan yang mengawali dan melestarikan sikap kritis agar Gereja tetap eksis sebagai pelayan yang menggarami dan menerangi dunia ini.⁴ Institusi atau mitra yang berperan sebagai partner kerja pemerintah harus hadir di tengah kejahatan korupsi yang merebak di Indonesia. Kehadiran mereka merupakan salah satu bentuk ungkapan suara rakyat yang turut mewakili suara masyarakat yang tertindas. Gereja Katolik, dengan spirit sosialnya, telah lama terlibat dalam perjuangan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah melalui lembaga JPIC (*Justice, Peace, and Integrity of Creation*) Serikat Sabda Allah (SVD) Ende.

³ Fenia Ninut, NTT Masuk 3 Besar Provinsi Paling Korup di Indonesia Tahun 2024, dalam PosNTT.com.<https://postntt.com/?pg=ntt-masuk-3-besar-provinsi-paling-korup-di-indonesia-tahun-2024-ini-data-icw&url=baca-berita%2FMjcxNQ%3D%3D%2F2025-10-11%2Fcontext&src=info>, diakses pada 1 November 2025.

⁴ David Ming, Peranan Gereja Dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik di Indonesia, *Jurnal Kadesi*, 3:2 (Bogor: Juli 2021), hlm. 93.

Misi JPIC SVD Ende berpedoman pada misi Yesus. Keberpihakan dengan para korban ketidakadilan adalah fokus utama dari misi tersebut. Dengan kata lain, JPIC SVD Ende menaruh Yesus sebagai standar misi dalam menjalankan tugas pelayanannya.⁵ Tugasnya sangat profetis dan liberatif. Komisi Gereja Katolik ini bergerak bersama dengan para penganut agama-agama lain dan dengan semua orang yang berkehendak baik, kemudian bertugas untuk membela orang miskin atau manusia pada umumnya yang martabat kemanusiaannya ditindas dan dibelenggu (*option for the poor*) dan sumber-sumber hidupnya dirampas dan dieksploitasi (*option for creation*) oleh struktur sosial ekonomi dan politik yang tak adil. Kontribusi JPIC SVD Ende dalam menanggapi fenomena korupsi di Kabupaten Sikka menegaskan komitmen dan prinsip Gereja Katolik pada keadilan sosial dan keberpihakan pada masyarakat kecil dan tertindas. Perannya bukan hanya sebatas menanggapi, tetapi juga sebagai penghubung antara Gereja, masyarakat sipil dan pemerintah. Dalam rekam jejaknya, JPIC SVD Ende menjalankan advokasi bukan hanya melalui jalur hukum tetapi juga solidaritas langsung dengan para korban, mendistribusikan bantuan dan menjadi perwakilan suara bagi kelompok rentan di Kabupaten Sikka. Ini menegaskan bahwa keberpihakan Gereja adalah pada orang miskin dan terpinggirkan bukan pada kepentingan elite atau golongan.

Di samping inisiatif gerakan misi dari JPIC SVD Ende, Gereja universal juga tampil dengan seruan moral dan memberi dasar refleksi teologis yang dapat menjadi kerangka dalam mempertajam sikap terhadap korupsi. Salah satu dokumen penting Gereja adalah ensiklik *Fratelli Tutti* yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada tahun 2020. Dalam ensiklik ini, Paus memberikan penekanan akan pentingnya membangun tali persaudaraan universal dan solidaritas antar manusia sebagai landasan bagi kehidupan sosial yang adil. Paus Fransiskus memberikan penolakan dengan tegas terhadap segala bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang dan praktik penindasan terhadap martabat manusia. Korupsi, dalam kerangka ini, dilihat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap persaudaraan, karena hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan

⁵ Hasil wawancara dengan Pater Robert Minsel SVD, Anggota JPIC SVD Ende, pada 20 September 2025 di Chandraditya Maumere.

banyak orang lainnya. *Fratelli Tutti* hadir dan memberikan seruan moral agar umat manusia secara khusus orang beriman tidak boleh bersikap pasif atau apatis terhadap praktik ketidakadilan, melainkan turut mengambil peran dan memberikan kontribusi secara aktif dan nyata dalam memperjuangkan nilai-nilai moral seperti kebenaran, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks Indonesia, secara khusus di Kabupaten Sikka, seruan moral ini sejalan dengan perjuangan JPIC SVD Ende untuk menegakkan keadilan melawan dan memberantas praktik korupsi.

Dengan demikian, melalui penggabungan antara refleksi sosial dan refleksi moral dari *Fratelli Tutti*, serta pengalaman konkret JPIC SVD Ende, penulis menyadari dan terdorong untuk mendalami tema ini untuk mengetahui sejauh mana kontribusi nyata JPIC SVD Ende dalam menanggapi kasus korupsi di Kabupaten Sikka, serta bagaimana kontribusi tersebut dapat dipahami, diteguhkan, dan diperkaya dengan perspektif Gereja universal sebagaimana disampaikan dalam ensiklik *Fratelli Tutti*. Maka, penulis membahas tema ini dalam karya tulis yang berjudul: **KONTRIBUSI JPIC SVD ENDE DALAM MENANGGAPI KASUS KORUPSI DI KABUPATEN SIKKA DITINJAU DARI TERANG ENSIKLIK *FRATELLI TUTTI* (68-80)**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang hendak diangkat penulis dalam tulisan ini adalah bagaimana melihat korupsi bukan hanya sebagai tindak pidana saja, tetapi melihat akibat fatal dari korupsi tersebut yang melecehkan martabat dan harkat manusia secara khusus masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Setelah itu, penulis akan melihat bagaimana kontribusi JPIC SVD Ende dalam menanggapi akibat-akibat dari kasus-kasus korupsi tersebut dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*.

Berdasarkan masalah utama tersebut, penulis mengemukakan empat masalah turunan yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini: *pertama*, bagaimana kasus korupsi di Kabupaten Sikka dan faktor-faktor penyebab kasus tersebut ? *kedua*, bentuk-bentuk kontribusi JPIC SVD Ende

dalam menanggapi kasus korupsi di Kabupaten Sikka? *ketiga*, bagaimanakah sudut pandang ensiklik *Fratelli Tutti* dalam memandang isu korupsi? *keempat*, bagaimana kesesuaian antara tantangan kontribusi JPIC SVD Ende dengan semangat persaudaraan universal dalam *Fratelli Tutti*?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan penulisan karya ilmiah ini yang terdiri dari tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dari tulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Sementara itu tujuan umum, antara lain: *pertama* mendeskripsikan peran dan kontribusi JPIC SVD Ende terkait kasus korupsi di Kabupaten Sikka. *Kedua*, menganalisis sikap Gereja, khususnya melalui *Fratelli Tutti*, dalam menolak dan mengatasi korupsi. *Ketiga*, menjelaskan relevansi dan tantangan kontribusi JPIC SVD Ende berdasarkan pandangan yang diajukan dalam *Fratelli Tutti*.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang ditempuh dalam penulisan skripsi ini yakni metode pendekatan kualitatif-deskriptif, studi dan analisis kepustakaan serta analisis teologis. Penulis mencoba mencari berbagai sumber tertulis mengenai tema yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang mendalam dan menggali informasi yang sah dan terbukti dengan pihak Inspektorat Kabupaten Sikka, staf dan aktivis JPIC SVD Ende, tokoh gereja dan aktivis lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian besar yang diulas dalam lima bab. Tentunya dalam tulisan ini, penulis memperhatikan keterkaitan tiap-tiap bab sehingga boleh menjadi satu-kesatuan untuk menjawab permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini. Kelima bab itu dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis memuat beberapa poin yakni: latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II Fenomena Korupsi di Kabupaten Sikka dan Ensiklik *Fratelli Tutti*. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan sekilas tentang korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi, Kabupaten Sikka serta situasi ekonomi, sosial dan budayanya, kasus korupsi Kabupaten Sikka kemudian pembahasan akan berlanjut dengan latar belakang terbitnya ensiklik *Fratelli Tutti*. Latar belakang penerbitan *Fratelli Tutti* sangat penting untuk melihat beberapa inti sari dari *Fratelli Tutti*. Kemudian, penulis mencoba untuk menampilkan gambaran umum *Fratelli Tutti* lalu mengkaji fokus-fokus *Fratelli Tutti* terhadap kasus korupsi dengan melihat dari sudut pandang bab II *Fratelli Tutti*.

Bab III Aksi Pelayanan Kemanusiaan JPIC SVD Ende. Dalam bab ini, penulis menampilkan dan membahas sekilas tentang Serikat Sabda Allah, profil Provinsi SVD Ende, sejarah berdirinya JPIC SVD Ende, nilai-nilai dasar dalam JPIC SVD Ende dan bidang-bidang pelayanan JPIC SVD Ende. Bidang-bidang pelayanan tersebut antara lain bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan hidup serta tantangan dan kendala yang dihadapi oleh JPIC SVD Ende.

Bab IV Kontribusi JPIC SVD Ende Berdasarkan Perspektif Ensiklik *Fratelli Tutti*. Pada bab ini, penulis menguraikan beberapa poin penting menyangkut kontribusi JPIC SVD Ende terhadap kasus korupsi berdasarkan ensiklik *Fratelli Tutti* serta menguraikan beberapa catatan kritis dan tawaran alternatif bagi pelayanan JPIC SVD. Poin-poin penting tersebut yaitu menciptakan kepemimpinan yang peduli, menggerakkan solidaritas sosial melalui pendekatan pastoral, membangun kembali persaudaraan sosial dan pelayanan tanpa sekat.

Bab V Penutup. Pada bagian ini penulis mencoba mengambil kesimpulan akhir dan usul saran mengenai kontribusi JPIC SVD Ende dalam menanggapi kasus korupsi di Kabupaten Sikka dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*.